

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sudjono, D., (1984) . *Sosio kriminologi amalan ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*. Bandung , Sinar Baru.

Elisatris, G., Arief Mansur, DM., (2007) . *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta , Raja Grafindo Persada.

Indonesia, IOM., (2017) . *Prosedur standar operasional pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang*. Batam , IOM Indonesia.

Anita, E., (2016) . *An assessment of human trafficking in batam district to contribute to the government efforts in combating trafficking in person*. Batam , IOM Indonesia.

Wirjono , P., (2003) . *Asas-asas hukum pidana di indonesia*. Bandung , PT. Refika Redaksi.

Moeljatno . (1987) . *Asas-asas hukum pidana* . Jakarta , PT Rineka Cipta.

Muladi. (2000) . *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana* . Semarang , Universitas Diponegoro.

Indonesia , IOM., ( 2017) . *(Identifikasi dan panduan penyediaan layanan korban TPPO bagi petugas garda depan di kota batam* . Jakarta , IOM Indonesia).

### Peraturan

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 14. Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 58. Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008*

*Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.* Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 22.

Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 58. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.* Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013, No 5. Sekretaris Daerah Kota Batam. Batam

Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.* Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016, No 490. Sekretaris Daerah Kota Batam. Batam

### **Internet**

Pramugarini, Y., (2011). *Pidana Perdagangan Orang.* Di akses tanggal 18 Juni 2019, melalui [https://unsla.uns.ac.id/index.php/opac/search/judul\\_buku/semua/Islam](https://unsla.uns.ac.id/index.php/opac/search/judul_buku/semua/Islam)

Gosita, A., Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan. Di akses tanggal 12 Juli 2019, melalui [http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira\\_Dwiati\\_Tesis.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf)

Irvil Waller, *Victims of Crime, Kindle edition*, diakses tanggal. 20 Juni 2019, melalui <https://www.amazon.com/Rights-Victims-Crime-Rebalancing-Justice-ebook/dp/B004EHZZ32>

nisak, risa. “Definisi HAM Pengertian HAM Atau Hak Asasi Manusia (Human Rights.” Diakses pada tanggal 27 Juni 2019. melalui [https://www.academia.edu/9253288/Definisi\\_HAM\\_Pengertian\\_HAM\\_atau\\_](https://www.academia.edu/9253288/Definisi_HAM_Pengertian_HAM_atau_)

Hak\_Asasi\_Manusia\_Human\_Rights?Auto=download,” n.d.

